

PENGARUH KARAKTERISTIK DAERAH DAN TINGKAT KETIDAKPATUHAN SPI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Maria Octaviani Pauli

mariapauli19@yahoo.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the effect of local government characteristics and the level of non-compliance with SPI on the local or district government performance of Indonesia in budget period of 2015. The performance measurement use performance evaluation of local government organizers (EKPPD), with the source of EKPPD taken from financial statement of local government. The population was local government in Indonesia. While, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, there were 140 local government of Indonesia as sample. The research result, from linear regression statistics, concluded local size, the level of dependence on the central government, capital expenditure and the level of non-compliance with SPI had significant effect on the local governments performance. However, for the capital expenditure, the direction was not in accordance with the research hypothesis as its result was negative. Moreover, the regional wealth level did not affect the local governments performance.

Keyword: local government performance, LPPD, EKPPD, local characteristics, level of non-compliance SPI.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan tingkat ketidakpatuhan SPI (TK) terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2015. Pengukuran kinerja dengan menggunakan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD), dimana sumber EKPPD berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan populasi semua pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu memilih pemerintah daerah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria yang ditetapkan penulis. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 140 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil olah statistik regresi linear dapat disimpulkan bahwa ukuran daerah (UD), tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (TKPP), belanja modal (BM), dan tingkat ketidakpatuhan SPI (TK) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, tetapi untuk variabel belanja modal (BM) arah tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian karena hasilnya adalah negatif. Sementara itu untuk variabel tingkat kekayaan daerah (TKD) tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: kinerja pemerintah daerah, LPPD, EKPPD, karakteristik daerah, tingkat ketidakpatuhan SPI.

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Tujuan desentralisasi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

Salah satu strategi utama dalam mencapai tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah melakukan proses monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif, untuk mengukur kemajuan dan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk itu kepala daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang

selanjutnya dilakukan evaluasi setiap tahunnya, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Selain itu, terdapat beberapa informasi pelengkap untuk melakukan EKPPD ini antara lain, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, informasi keuangan daerah, dan laporan kinerja instansi pemerintah daerah. Sasaran EKPPD meliputi tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksanaan kebijakan daerah. Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan (Pasal 2 PP No. 3 Tahun 2007).

Sementara itu, salah satu pengukuran kinerja pada EKPPD adalah pengukuran pada kepatuhan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan salah satu hasil pemeriksaan BPK yakni pemeriksaan kinerja yang didalamnya mengungkapkan ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan. Semakin banyak temuan audit, semakin menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah kurang baik. Sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja dari pemerintah daerah tersebut.

Semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah juga memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang beragam tergantung dari kekayaan daerah yang dimiliki. Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi seharusnya akan lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaan asli daerahnya untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran (belanja modal) dengan tujuan menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Setiap pemerintah daerah juga mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang beragam sesuai dengan keadaan dari masing-masing pemerintah daerah, semakin tinggi presentase DAU yang di dapat oleh suatu daerah menunjukkan daerah tersebut semakin tidak mandiri dan belum menjalankan kinerja secara optimal.

Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk menganalisis dan menguji **Pengaruh Karakteristik Daerah dan Tingkat Ketidakpatuhan SPI terhadap Kinerja Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia**. Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?, (2) Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?, (3) Apakah tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?, (4) Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?, (5) Apakah tingkat ketidakparuhan SPI berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Teory*)

Teori utama yang mendasari penelitian tentang pengaruh karakteristik daerah dan tingkat ketidakpatuhan SPI terhadap kinerja pemerintah daerah dijelaskan melalui perpektif *agency theory*. Renas dan Muid (2014) mendefinikan hubungan agensi sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Teori agensi ini dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah karena adanya desentralisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai kewenangan dapat mengatur otonomi daerahnya masing-masing.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agen bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal*. Adanya *information asymmetry* memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Karenanya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry* (Setiawan, 2012).

Berdasar *agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Setiawan (2012) dalam Harumiati dan Payamta (2014) menjelaskan dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang.

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014:14). Setphen P Robin (2008:92) menyatakan bahwa kinerja adalah ukuran hasil kerja yang dilakukan dengan menggunakan kriteria yang disetujui bersama. Meiliana *et al* (2016) mengungkapkan kinerja pemerintah daerah adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu daerah berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, kinerja pemerintah daerah merupakan pencapaian prestasi daerah pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan daerah. Pengukuran kinerja (*performence measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Galang Afrian, 2016).

Untuk mengetahui capaian kinerja yang telah diperoleh organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Penelitian yang dilakukan Mandell (1997) mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, Pemda memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah (PP No. 3 Tahun

2007). Sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pemerintah menggunakan LPPD.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib meliputi urusan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD)

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Untuk melengkapi Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa salah satu evaluasi kinerja yang dilakukan pemerintah terhadap pemerintah daerah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dengan menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai sumber. EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

EKPPD menghasilkan laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 32 No. 73 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota secara nasional, disusun berdasarkan peringkat, skor, dan status. Berdasarkan hal ini maka didapatkan skor kinerja untuk masing-masing pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Karakteristik Daerah

Menurut Kamus umum Bahasa Indonesia (2006) karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, karakteristik pemerintah daerah adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan pemerintah daerah lain.

Ukuran Daerah

Ukuran (*size*) merupakan salah satu elemen dari struktur organisasi. Terdapat bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi didalam suatu daerah dapat mempengaruhi struktur daerah. Organisasi-organisasi besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil. Oleh karena itu, pemerintah daerah tersebut akan menaruh perhatian yang lebih tinggi dalam pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi (Patrick, 2007).

Pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar juga untuk melakukan pengungkapan kinerja. Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kinerjanya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat berita baik. Berita baik tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah yang pada akhirnya meningkatkan kinerjanya.

Tingkat Kekayaan Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut karena PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Selain itu, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini dikarenakan PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Juliawati *et al.*, 2012). Dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan, PAD memiliki peran yang cukup signifikan.

Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Belanja Modal

Belanja modal bertujuan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal ke dalam APBD, yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan saran dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik untuk menambah aset tetap. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Abdullah, 2006).

Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (*agent*) akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (*principal*) sehingga kinerja daerah akan lebih baik.

Tingkat Ketidapatuhan SPI

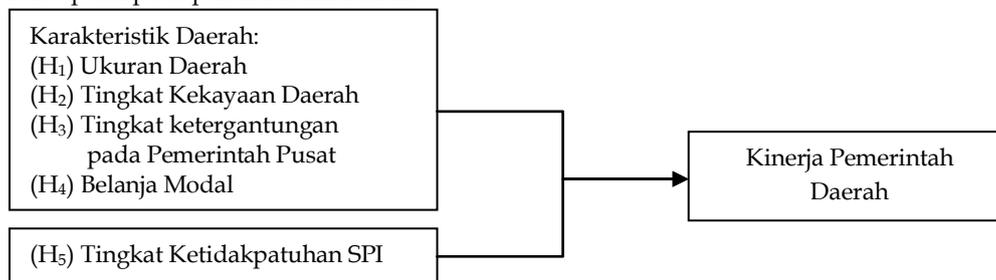
Pemeriksaan adalah proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Undang-Undang No. 15 Tahun 2004).

Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pemeriksaan yang dilakukan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,

pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap pemeriksaan keuangan memuat opini, terhadap pemeriksaan kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan terhadap pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat rekomendasi.

Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual pada penelitian ini adalah:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardhani, 2012).

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja. Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kinerjanya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat *good news*. *Good news* tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut sehingga meningkatkan kinerja.

H₁: Ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar, maka tuntutan peningkatan PAD semakin besar. Dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan, PAD memiliki peran yang cukup signifikan.

H₂: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Selain ukuran dan tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat juga berbeda-beda yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Dengan kata lain DAU menunjukkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang akan menambah pendapatan daerah.

Sayangnya, menurut Damayanti (2014), formulasi perhitungan DAU tidak memberikan stimulus bagi daerah untuk meningkatkan PAD karena merasa dapat mengandalkan DAU. Secara tidak langsung, semakin tinggi presentase DAU yang didapat oleh suatu daerah menunjukkan daerah tersebut semakin tidak mandiri dan kinerjanya belum optimal. Tingginya persentase jumlah dana perimbangan mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak mandiri dalam mengelola pendapatannya dan dapat menyebabkan penilaian akuntabilitas kinerja semakin rendah karena persentase Dana Perimbangan yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak mampu dalam merencanakan dan menjalankan program/kegiatan untuk mengoptimalkan PAD (Nuridin, 2015).

H₃: Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. Belanja modal sangat terkait dengan pembangunan infrastruktur daerah yang digunakan oleh masyarakat. Semakin besar belanja modal, maka akan semakin banyak infrastruktur yang terbangun yang artinya pelayanan kepada masyarakat akan semakin bagus, pertumbuhan semakin meningkat, dan kesejahteraan masyarakat juga semakin baik (Setiawan, 2011).

H₄: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Ketidapatuhan SPI terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tingkat ketidapatuhan SPI merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya kinerja pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka seharusnya menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu pemerintah daerah.

H₅: Tingkat ketidapatuhan SPI berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat, belanja modal, dan tingkat ketidapatuhan SPI, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah berdasarkan skor kinerja.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel dengan memilih sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian (Sekaran, 2011:136). Adapun kriteria sampel yang dipilih pada penelitian ini yaitu: 1.) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki data PAD, DAU, total pendapatan, belanja modal, dan total belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada tahun 2015 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; 2.) Pemerintah daerah kabupaten/kota harus memiliki data skor kinerja yang tertera dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri; 3.) Pemerintah daerah kabupaten/kota harus memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas ketidapatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan 2015.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yaitu data hasil pemeringkatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD) untuk LKPD tahun 2015, data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk LKPD tahun 2015.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja organisasi merupakan komponen penting yang memberikan motivasi dan arah serta umpan balik terhadap efektivitas perencanaan dan pelaksanaan proses perubahan dalam suatu organisasi (Renas, 2014). Untuk menilai apakah kinerja pemerintah daerah di Indonesia sudah baik atau belum, perlu mengacu hasil pemeringkatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dikeluarkan oleh Kemendagri RI yang penilaian utamanya menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Variabel Independen

Ukuran Daerah (UD)

Ukuran pemerintah daerah dapat menunjukkan besar kecilnya skala ekonomi suatu pemerintah daerah. Dalam penelitian ini variabel ukuran pemerintah daerah menggunakan logaritma natural (Ln) dari total pendapatan. Total pendapatan tersebut berasal dari Realisasi APBD tahun 2015.

$$UD = \text{Ln} (\text{Total Pendapatan})$$

Tingkat Kekayaan Daerah (TKD)

Tingkat kekayaan daerah dapat diukur dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada penelitian ini, tingkat kekayaan daerah diukur dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan.

$$TKD = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}}$$

Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat (TKPP)

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat diukur dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada penelitian ini, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan.

$$TKPP = \frac{DAU}{\text{Total Pendapatan}}$$

Belanja Modal (BM)

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Pada penelitian ini variabel belanja modal diukur dengan belanja modal dibandingkan dengan total belanja.

$$BM = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Tingkat Ketidapatuhan SPI (TK)

Tingkat Ketidapatuhan SPI merupakan kasus-kasus yang ditemukan pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengenai pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap sistem pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Temuan audit yang digunakan dalam variabel ini adalah temuan atas ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jumlah kasus temuan menunjukkan seberapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut.

$$TK = \text{Jumlah Kasus}$$

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Model regresi yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi-asumsi yang disebut asumsi klasik. Uji asumsi meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel penelitian telah memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat digunakan dua cara yaitu analisis grafik dan analisis statistik (Ghozali, 2016:154). Pengujian normalitas dengan menggunakan normal P-P Plot dan terkadang histogram bersifat subyektif, sehingga dalam hal normalitas, pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan uji *kolmogorov smirnov* dengan kriteria apabila signifikansi melebihi 0,05 maka data tersebut telah terdistribusi normal. Sebaliknya, apabila signifikansi kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* (TOL) dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut-off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2016:103).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan satu dengan yang lain sepanjang waktu, sehingga hasil dari regresi menjadi tidak efisien karena varian tidak minimum dan menjadikan tes signifikansi tidak akurat. Untuk pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian *runs test*, dengan ketentuan nilai signifikansi $>0,05$.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji ini dilakukan dengan metode *scatterplot* antara nilai prediksi variabel independen dengan residualnya, yaitu SRESID (nilai residual) dengan ZPRED (nilai prediksi). Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada

model regresi yang dibentuk, sedangkan jika *scatterplot* menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Titik-titik ini akan menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, X_3, \dots) terhadap variabel dependen (Y). Tujuan dari analisis regresi adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2016:94). Uji regresi linier berganda dapat dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{KINERJA} = \beta_a + \beta_1 \text{UD} + \beta_2 \text{TKD} + \beta_3 \text{TKPP} + \beta_4 \text{BM} + \beta_5 \text{TK} + e$$

Dimana:

KINERJA = Kinerja Pemerintah Daerah

β_a = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Regresi Variabel Independen

UD = Ukuran Daerah

TKD = Tingkat Kekayaan Daerah

TKPP = Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

BM = Belanja Modal

TK = Tingkat Ketidapatuhan SPI

e = Error

Pengujian Hipotesis

Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)

Pengujian kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model atau persamaan regresi yang tertentu tersebut layak untuk dijadikan sebagai alat estimasi dalam penelitian. Hasil uji F dapat dilihat dalam ANOVA dalam kolom *Sig.* dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Adapun ketentuan nilai signifikansi yang baik yaitu harus dibawah 0,05. Jika nilai signifikansi tersebut $<0,05$ maka model regresi dianggap cocok (fit), namun bila nilai signifikan $>0,05$ maka model regresi dianggap tidak cocok (tidak fit).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan persamaan regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependennya. Hasil perhitungan *adjusted R²* dapat dilihat pada hasil output model *summary*. Pada kolom *adjusted R²* dapat diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (Uji t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom *sig.* Jika nilai probabilitas $<0,05$ maka terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu. Namun, bila nilai probabilitas $>0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara individu antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

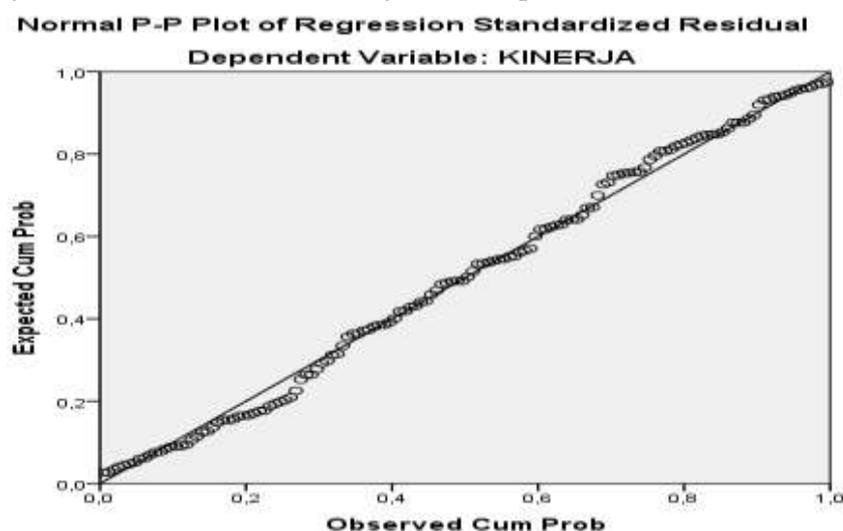
Dalam penelitian ini data penelitian didasarkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Indonesia tahun 2015, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II BPK RI Tahun 2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling* sehingga dari 508 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2015 didapatkan 140 kabupaten/kota yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Terdapat 344 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang tidak memiliki LKPD, tidak memiliki skor kinerja, dan tidak terdapat dalam IHPS dari BPK tahun anggaran 2015. Data tersebut diperoleh dari BPK. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, dan tingkat ketidakpatuhan SPI terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Indonesia.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut, variabel-variabel penelitian telah memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data dapat digunakan analisis grafik dengan melihat *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Jika data normal, maka data akan meyebar disekitar garis diagonal dan mengikutiarah garis diagonal.

Hasil uji normalitas data *P-Plot* disajikan sebagai berikut:



Sumber: Realisasi APBD, 2019 (diolah)

Gambar 1

Hasil Uji Normalitas

Berikut hasil pengujian normalitas non-parametrik *kolmogorov-smirnov* setelah dilakukan outlier dan transformasi:

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas Non Parametrik – Setelah Outlier dan Transform
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,16891455
Most Extreme Differences	Absolute	,059
	Positive	,059
	Negative	-,052
Test Statistic		,059
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Realisasi APBD, 2019 (diolah)

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut terdapat adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* (t) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai $t > 0,10$ dan nilai $VIF < 10$, maka model regresi dapat dinyatakan tidak terdapat multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	UD	,438	2,282
	TKD	,519	1,925
	TKPP	,471	2,125
	BM	,687	1,455
	TK	,961	1,041

Sumber : Realisasi APBD, 2019 (diolah)

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan nilai *Durbin-Watson*. Nilai *Durbin-Watson* digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Jika nilai *Durbin-Watson* di antara -2 sampai dengan +2, maka model regresi dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi. Hasil pengujian runs test dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

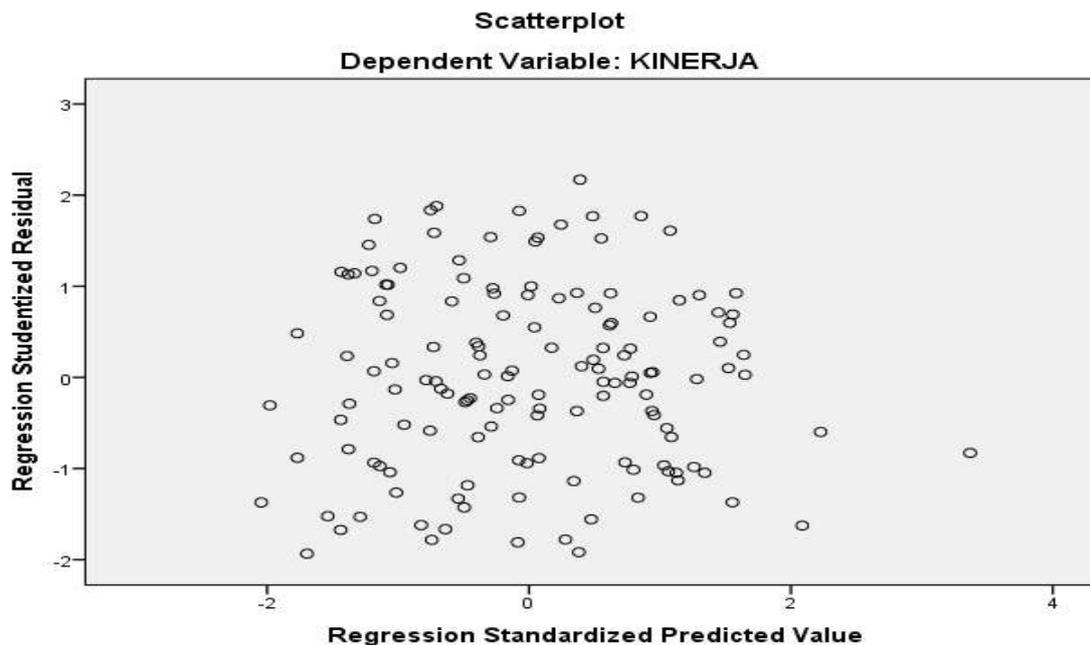
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,655 ^a	,429	,407	,1720371	1,521

Sumber: Realisasi APBD, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3 nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar 1,521 (terletak antara -2 sampai +2), maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi adanya autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebasnya. Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas pada model regresi, digunakan metode Analisis Grafik (*Scatterplot*). Jika titik menyebar secara acak dan berkisar pada angka 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil pengujian scatterplot untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas:



Sumber : Realisasi APBD, 2019 (diolah)

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini analisis regresi dilakukan untuk menguji pengaruh karakteristik daerah dan tingkat ketidakpatuhan SPI terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-,066	1,207		-,054	,957
	UD	,125	,041	,300	3,038	,003
	TKD	,305	,207	,134	1,475	,143
	TKPP	-,376	,173	-,206	-2,169	,032
	BM	-,658	,247	-,210	-2,662	,009
	TK	-,011	,003	-,205	-3,083	,002

Sumber : Realisasi APBD, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{KINERJA} = -0,066 + 0,125 \text{ UD} + 0,305 \text{ TKD} - 0,376 \text{ TKPP} - 0,658 \text{ BM} - 0,011 \text{ TK} + e$$

Pengujian Hipotesis

Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)

Uji kelayakan model regresi dilakukan untuk mengetahui apakah model atau persamaan regresi yang telah terbentuk layak untuk dijadikan sebagai alat estimasi dalam penelitian. Uji F ini dapat dijelaskan dengan menggunakan *analysis of variance* (ANOVA) dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Apabila nilai signifikansi < 0,05; maka hal ini berarti bahwa persamaan regresi yang terbentuk layak untuk dijadikan sebagai alat estimasi dan dapat diuji lebih lanjut, begitu juga sebaliknya.

Hasil uji kelayakan regresi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,975	5	,595	20,107	,000 ^b
	Residual	3,966	134	,030		
	Total	6,941	139			

Sumber : Realisasi APBD, 2019 (diolah)

Dari hasil kelayakan model regresi (*Goodness of Fit*) yang telah disajikan pada Tabel 5, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 20,107 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05; sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk layak atau baik untuk dijadikan sebagai alat estimasi dan dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Karena uji koefisien determinasi (R^2) memiliki kelemahan, maka digunakanlah *Adjust R Square* yang berkisar antara angka 0 dan 1. Apabila nilai *Adjust R Square* semakin mendekati angka 1, maka semakin tak baik kemampuan persamaan regresi tersebut dalam menjelaskan variabel dependennya. Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6
Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,655 ^a	,429	,407	,1720371

Sumber: Realisasi APBD, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa nilai *Adjust R Square* yaitu sebesar 0,407. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai variabel kinerja pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan tingkat ketidakpatuhan SPI adalah sebesar 40,7 persen. Dan sisanya yaitu 59,3 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji statistik T dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen secara individual. Dengan

menggunakan tingkat signifikansi 0,05; maka apabila t hitung $>$ t tabel atau $Sig. <$ 0,05; maka hal ini menunjukkan bahwa variabel berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila t hitung $<$ t tabel atau $Sig. >$ 0,05; maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji signifikansi parameter individual disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,066	1,207		-,054	,957
	UD	,125	,041	,300	3,038	,003
	TKD	,305	,207	,134	1,475	,143
	TKPP	-,376	,173	-,206	-2,169	,032
	BM	-,658	,247	-,210	-2,662	,009
	TK	-,011	,003	-,205	-3,083	,002

Sumber : Realisasi APBD, 2019 (diolah)

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 7, nilai signifikansi (*Sig.*) dari masing-masing variabel independen, yaitu variabel ukuran daerah (UD) sebesar 0,003; variabel tingkat kekayaan daerah (TKD) sebesar 0,143; variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (TKPP) sebesar 0,032; variabel belanja modal (BM) sebesar 0,009; dan variabel tingkat ketidakpatuhan (TK) sebesar 0,002.

Dari kelima variabel independen tersebut terdapat empat variabel yang memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena nilai *Sig.* $<$ 0,05 yaitu variabel ukuran daerah (UD), variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (TKPP), variabel belanja modal (BM), dan variabel tingkat ketidakpatuhan (TK). Sedangkan satu variabel independen lainnya yaitu tingkat kekayaan daerah (TKD) memiliki nilai *Sig.* $>$ 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu kinerja pemerintah daerah.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya nilai t hitung dari variabel ukuran pemerintah daerah (UD) adalah sebesar 3,038 dengan nilai *Sig.* yaitu sebesar 0,003. Karena nilai *Sig.* $<$ 0,05 dan arah koefisiennya positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah secara individu berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga dalam penelitian ini H_1 diterima.

Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa semakin besar ukuran daerah, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut. Ukuran daerah yang besar akan mempermudah dalam kegiatan operasional dan pemberian pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Kemudahan dalam melaksanakan kegiatan operasional juga akan mendukung kelancaran perolehan PAD yang sangat berguna untuk kemajuan dan pembangunan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menyatakan semakin besar ukuran daerah maka semakin besar skor kinerja yang dimiliki daerah tersebut.

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Nilai t dari variabel tingkat kekayaan daerah (TKD) adalah sebesar 1,475 dengan nilai *Sig.* sebesar 0,143. Karena nilai *Sig.* $>$ 0,05. Artinya bahwa variabel tingkat kekayaan

daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan arah hubungan yang positif. Sehingga dalam penelitian ini H_2 ditolak.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin mandiri pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga tingkat ketergantungan kepada pihak eksternal menjadi rendah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Artha *et al.* (2015) yang menyatakan tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Untuk variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (TKPP) memiliki t hitung $-2,169$ dan nilai *Sig.* $0,032$. Nilai signifikansi variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat adalah $0,032 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (TKPP) berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga pada penelitian ini H_3 diterima.

Tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat menunjukkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin besar DAU yang diterima daerah, semakin besar dana transfer yang dilakukan pemerintah pusat menunjukkan daerah tersebut semakin tidak mandiri dan kinerjanya belum optimal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Suryaningsih dan Sisdyani (2016) yang menyatakan semakin besar transfer dana yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Variabel belanja modal (BM) memiliki t hitung sebesar $-2,662$ dengan nilai *Sig.* $0,009$. Nilai *Sig.* $< 0,05$ tetapi arah koefisiennya negatif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga dalam penelitian ini H_4 ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan semakin besar belanja modal maka semakin kecil kinerja penyelenggara pemerintah daerah. Pengaruh negatif belanja modal terhadap pemerintah daerah disebabkan belanja modal yang tinggi tidak digunakan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat sehingga kenaikan belanja modal semakin menurunkan kinerja penyelenggara pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang disampaikan sebelumnya, tetapi hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Mustikarini dan Fitriyani (2012) dan Sudarsana (2013) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Ketidapatuhan SPI terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Variabel tingkat ketidapatuhan (TK) memiliki t hitung sebesar $-3,083$ dengan nilai *Sig.* sebesar $0,002$. Nilai *Sig.* variabel tingkat ketidapatuhan SPI adalah $0,002 < 0,05$; maka dapat disimpulkan bahwa variabel temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga dalam penelitian ini H_5 diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kasus tingkat ketidapatuhan SPI, maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah tersebut. Jumlah kasus menunjukkan jumlah pelanggaran yang ditemukan oleh BPK atas ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012), dan Sudarsana (2013) yang menyatakan bahwa tingkat ketidapatuhan SPI berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis regresi berganda yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran daerah yang besar akan mempermudah dalam kegiatan operasional dan pemberian pelayanan yang memadai kepada masyarakat, (2) tingkat kekayaan daerah yang diprosikan dengan PAD tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian ini berarti semakin besar PAD yang dimiliki suatu pemerintah daerah kabupaten/kota menunjukkan semakin mandiri pemerintah daerah tersebut dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga tingkat ketergantungan kepada pihak eksternal menjadi rendah, (3) tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat menunjukkan bahwa seberapa besar ketrgantungan suatu daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin besar DAU yang didapat oleh suatu daerah menunjukkan daerah tersebut semakin tidak mandiri dan kinerjanya belum optimal, (4) belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hubungan negatif dalam hasil ini berarti bahwa semakin besar belanja modal maka semakin kecil kinerja pemerintah daerah tersebut. Belanja modal yang tinggi tidak digunakan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat sehingga kenaikan belanja modal semakin menurunkan kinerja penyelenggara pemerintah daerah, (5) Tingkat ketidakpatuhan SPI memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kasus suatu daerah atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut sehingga skor kinerja pemerintah daerah semakin rendah dan kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan belum baik.

Saran

Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia diharapkan agar semakin memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya semaksimal mungkin sehingga mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Bagi penelitian yang akan datang diharapkan dapat meneliti menggunakan data tahun yang lebih baru sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih terkini dan dapat memberikan kesimpulan yang lebih baik. Bagi penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan variabel independen lain dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Misalnya jumlah SKPD, ukuran legislatif, umur administratif pemerintah daerah, *laverage*, status daerah, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Artha, R. D., P. Basuki, dan Alamsyah. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB). *Jurnal InFestasi*. Volume 11. Nomor 2. Desember 2015.
- Abdullah, Syukriy dan A. Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2 Nomor 2. November.
- Afriani, Galang. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit (BPK) dan Laverage terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *JOM FEKON*. Volume 3. Nomor 1. Februari 2016.

- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II tahun 2015. <http://bpk.go.id>.
- DJPK. 2015. Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harumiyati, Y. dan Payamta. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2011. *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*. Volume 3. Nomor 2.
- Juliawati, Ebit. Darwanis dan Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Syiah Kuala*. Volume 1. Nomor 1.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Halaman 14.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2015). Penetapan Peringkat dan Status Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional. <http://otda.kemendagri.go.id>.
- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh *Size*, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. Volume 1. Universitas Negeri Semarang.
- Mandell, Lee M. 1997. *Performance Measurements and Management Tools in North Carolina Local Government*. Public Administration Quarterly; Spring 1997; Volume 21: 96.
- Meilina, Z. D., D. W. Hapsari, dan V. J. Dillak. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014). *E-Proceeding of Management*. Volume 3. Nomor 3. Halaman 3475-3483. Desember.
- Mustikarini, W. A. dan D. Fitriarsari. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda Kabupaen/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Nurdin, Fandy. 2015. Pengaruh karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemda. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Universitas Brawijaya.
- Patrick. 2007. *How to Conduct and Leverage an Expertise Audit*. Straits Knowledge. Working Paper. 1-13.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laopran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Renas dan D. Muid. 2014. Pengaruh karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Periode 2009-2011. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 4 Nomor 3.
- Realisasi APBD tahun 2015. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Robbins, S. P. dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat Halaman 92.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods for Business : A Skill Building Approach 4th Ed*. Jakarta : Salemba Empat.

- Setiawan, Wahyu. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. FE Universitas Diponegoro.
- Sudarsana, H. S. dan S. N. Rahardjo. 2013. Pengaruh karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 2. Nomor 4. Halaman 1-13.
- Suryaningsih, N. M. dan E. A. Sisdyani. 2016. Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi* Universitas Udayana. Volume 15. Nomor 2. Mei.
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah Menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- Qowi, R. dan W. Prabowo. 2017. Pengaruh Karakteristik dan Temuan Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun Anggaran 2012. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 6 Nomor 1. Halaman 1-13.